

SKRIPSI

**PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

GEMPA BUMI DI LOMBOK

*THE ROLE OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BPBD)
OF NTB PROVINCE IN THE EARTHQUAKE NATURAL
DISASTER COUNTER OF LOMBOK*



Di Susun oleh:

RANGGA LARAMA

216110029

JURUSAN URUSAN PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MATARAM

TAHUN2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ajikan ke Panita Ujian Skripsi

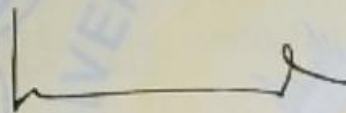
Program Studi Administrasi Publik pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2020

Menyetujui :

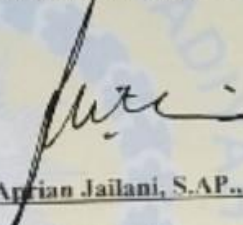
Dosen Pembimbing I



(Dr. H. Ibrahim Abdullah, MM)

NIDN. 0830125501

Dosen Pembimbing II



(M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP)

NIDN. 0804049501

Mengetahui,

Program Studi Administasi Publik

Ketua



(RAHMAD HUBAYAT, S.AP., M.AP)

NIDN. 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI
PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA
BUMI DI LOMBOK

Oleh :
RANGGA LARAMA

NIM. 216110029

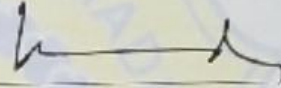
SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.

Mataram, 30 Januari 2020

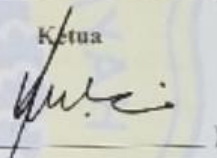
Tim Penguji

1. Dr. H.Ibrahim Abdullah, MM
NIDN. 0830125501

()

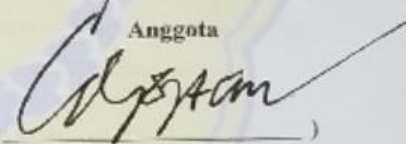
Ketua

2. M. Aprian Jailani, S.AP.,M.AP
NIDN. 0804049501

()

Anggota

3. Drs. H.Mustamin H.Idris.,MS
NIDN. 0825078701

()

Anggota

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



(Dr. H. Muhamad Ali, M.Si)
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANGGA LARAMA

NIM : 216110029

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benarannya dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 12 Agustus 2020



RANGGA LARAMA
NIM. 216110029



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upi.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Larana
NIM : 216110029
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa 12 Agustus 1995
Program Studi : Administrasi publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan politik
No. Hp/Email : 085 236104 929
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Lombok

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Penulis



Rangga Larana
NIM 216110029

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Rikandar S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hiduplah Semaksimal Mungkin Sampai Di Titik Dimana Hari
Seninmu Menjadi Seperti Hari Minggu”

(Rangga Larama/Penulis)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang Tua saya **Bapak Ramlin** dan **Ibu Sumiati** yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat terbaik selama penyusunan skripsi ini.
2. Kakak saya Riska Safitri yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua adik saya Muhammad Iqbal dan Tasya Asifa yang telah mensupport saya sehingga saya menjadi semangat dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya baik secara mental maupun materi sehingga saya menjadi giat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Alumni tercinta fakultas ilmu sosial dan politik jurusan administrasi public.
6. Almamaeter tercinta UNIVERSITA MUHAMMADIYAH MATARAM.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Bapak Drs. H.M Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Bapak DR. H.Ibrahim Abdullah, MM selaku Dosen Pembimbing I dan bapak M.Aprian Jailani, S.AP.,M.AP selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun Skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak RAMLIN dan Ibu SUMIATI yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Untuk Sahabat-sahabat saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram yaitu: Rena, Onji, Imam, Nita, Deda, Eny, dan Umam.

7. Untuk Teman-teman saya yang berada di kampung Halaman saya Sumbawa kabupaten Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selalu mendukung dan memberi semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yaitu: Rahayu, Rizaldy, Akmal, Aldino, Rita, Ary, Saskia, Yasmin, Ghea, Gita, Darta.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun Skripsi, Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, Agustus 2020

Penyusun

RANGGA LARAMA

216110029

ABSTRAK

PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI LOMBOK

Oleh :

RANGGA LARAMA

216110029

Pada penelitian ini ingin melihat peranan BPBD dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi yang terjadi di Lombok NTB. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji bagaimana peranan BPBD dalam menanggulangi bencana gempa bumi di Lombok dan untuk mengetahui apa saja factor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam Gempa Bumi di Lombok. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 1 minggu setelah sidang proposal yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu 6 Februari 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020. Lokasi penelitian ini di BPBD Provinsi NTB yang terletak di jalan Linkar selatan, Jempong Baru Kec. Sekarbela, kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Serta teknik keabsahan data meliputi trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu. Hasil dari penelitian ini yaitu peranan BPBD dalam menanggulangi bencana gempa bumi di pulau Lombok memiliki peran yang sangat penting, hal ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam seperti kegiatan sosialisasi yang dimana BPBD bertugas membentuk sebuah kelompok-kelompok di setiap desa atau kelurahan untuk melakukan pembekalan kepada masyarakat perihal kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana. Selain itu BPBD juga melakukan evakuasi maupun dalam pembagian bantuan berupa sembako kepada korban pada setiap Kabupaten yang tersebar di Pulau Lombok. Ada beberapa kendala pada saat menghadapi bencana gempa bumi pada tahun 2018 lalu yaitu; Koordinasi antar lintas sektor yang dimana sudah baik tapi belum optimal, karena koordinasi atau komunikasi ini adalah ujung tombak dalam penanganan bencana. SDM yang juga terbatas, lokasinya sangat luas dan membutuhkan sumber daya dari luar daerah. Ini disebabkan karena anggota pada BPBD dalam hal menangani juga terbatas sehingga membutuhkan sumber dari luar seperti PMI dan alat berat untuk mengevakuasi korban bencana gempa bumi.

Kata Kunci : *Peran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Gempa Bumi*

ABSTRACT

THE ROLE OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BPBD) OF NTB PROVINCE IN THE EARTHQUAKE NATURAL DISASTER COUNTER OF LOMBOK

By:
RANGGA LARAMA
216110029

This study is wondering to examine the role of BPBD in overcoming natural earthquake disasters which occur in Lombok, NTB. The objectives of this study include understanding, analyzing, and examining the role of BPBD in overcoming disasters of the earthquake in Lombok, also to find out what are the inhibiting factors in implementing natural disaster management of earthquake in Lombok. This research was carried out for 6 months, starting from 1 week after the proposal session held by the researchers, was February 6, 2020 to August 12, 2020. The research located at BPBD NTB Province in Lingkar Selatan street, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram, West Nusa Tenggara. The data analysis techniques were done through data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The data validity techniques include the source of trigulation, technique trigulation and time trigulation.

The results of this study showed the role of BPBD in countering the disasters of an earthquake in Lombok was very significant. It can be seen from the activities in the preparedness dealing with natural disasters such as socialization activities, where BPBD formed the groups in every villages or sub-districts to provide provision to the community regarding disaster preparedness. In addition, BPBD also carried out evacuations and distributing aid in the form of basic foodstuffs to victims in each district spread across Lombok Island. There were several challenges during the earthquake disaster in 2018, namely; Inter-sectoral coordination which is suitable but not optimum yet, because coordination or communication is a spearhead in disaster management. Human resources are also limited; the location is very wide and requires regional resources. This is because BPBD members in terms of preventing too many limitations requirement, they need essential resources such as PMI and heavy equipment to evacuate victims of the earthquake.

Keywords: Role, Regional Disaster Management Agency, Earthquake

MENGESAHKAN
BAHWA FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
LABORATORIUM BAHASA
UNIVERSITAS ULHAMMADIYAH MATARAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIALISME.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Administrasi Publik.....	10
2.3 Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	13
2.3.1 Pengertian Peranan BPBD	13
2.3.2 Teori Peran Menurut Para Ahli	14
2.3.3 Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli.....	15

2.3.4 Dasar hukum penanggulangan bencana.....	19
2.4 Penanggulangan Bencana	22
2.4.1 Pra Bencana.....	22
2.4.2 Saat Kejadian Bencana.....	25
2.4.3 Paska Bencana	28
2.5 Pengertian Bencana.....	30
2.5.1 Bencana Alam	31
2.5.2 Bencana Buatan Manusia.....	34
2.6 Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian	38
3.2.1 Waktu Penelitian	38
3.2.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Informan atau Narasumber.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
3.7 Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Gambaran Umum Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Kantor BPBD Provinsi NTB	44
4.1.1.1 Sejarah Umum BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	44
4.1.1.2 Struktur Organisasi.....	45
4.1.1.3 Distribusi Sumber Daya	59
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	62
4.2.1 Peranan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di pulau lombok.	62
4.2.2. faktor yang menghambat BPBD dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi di pulau lombok.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74

5.1. KESIMPULAN.....	74
5.2. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian terdahulu	7
Tabel 4.1	Jumlah aparatur sipil negara pada kantor Badan penanggulangan bencana daerah provinsi NTB Tahun 2019.....	63
Tabel 4.2	Distribusi SDM pada kantor badan penanggulangan bencana daerah provinsi NTB Tahun 2019	63
Tabel 4.3	Distribusi SDM pada kantor badan penanggulangan bencana daerah provinsi NTB Tahun 2019.....	64
Tabel 4.4	Distribusi SDM (Tenaga Kontrak) pada kantor badan penanggulangan bencana daerah provinsi NTB.....	65
Tabel 4.5	Daftar bangunan roboh akibat bencana Gempa bumi di Provinsi NTB Tahun 2018.....	68
Tabel 4.6	Jumlah kerusakan tempat peribadahan akibat bencana gempa bumi diprovinsiNTB Tahun 2018.....	69
Tabel 4.7	Korban jiwa/meninggal pada bencana gempa bumi Provinsi NTB tahun 2018.....	72
Tabel 4.8	Korban luka-luka pada bencana gempa bumi Provinsi NTB tahun 2018.....	73

DAFTAR GAMBAR

Narasumber 1: Bapak Rizal selaku staff bidang kedaruratan dan logistik.....	79
Narasumber 2: Bapak Ibrahim kurniawan SE selaku Kepala penyelamatan dan evakuasi bidang kedaruratan dan logistik.....	80
Narasumber 3: Bapak H Ridha Ahyana,S.IP, selaku kepala Seksi Pencegahan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang secara geografis diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, yang mengakibatkan Negara Indonesia memiliki letak yang strategis. Akan tetapi letak Indonesia yang berada di zona pertumbukan tiga lempeng menyebabkan Indonesia memiliki deretan gunung api yang disebut '*Ring of Fire*'. Akibatnya Indonesia memiliki daerah yang subur karena memiliki tanah vulkanik dari aktifitas gunung berapi.

Namun dari keuntungan wilayah di Indonesia sebagai Negara kepulauan, terdapat berbagai macam potensi terjadinya bencana alam. Secara geografi sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kawasan rawan bencana, baik bencana aktual yang dapat dikelompokkan pada bencana gempa, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjirbandang, longsor, dan bencana-bencana yang bersifat kekinian. Sedangkan bencana potensial merupakan bencana-bencana yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam oleh generasi sekarang, sehingga memicu terjadinya bencana kekeringan dan hancurnya keanekaragaman hayati, bencana degradasi lahan dan kelaparan untuk generasi yang akan datang. Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan oleh gejala-gejala alam, baik itu gejala-gejala di perut bumi maupun akibat gejala-gejala cuaca dan perubahan iklim.

Mitigasi atau mengurangi dampak bencana dilakukan untuk memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda. Begitu pentingnya masalah kebencanaan untuk diselesaikan cukup menyita setiap negara untuk bersatu dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar terjadi keseimbangan ekosistem dalam mendukung proses kehidupan di atasnya, termasuk manusia untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga daerah yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam yang ada di Indonesia khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana alam di daerah. Salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah

dalam upaya penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai dengan rencana BPBD Provinsi NTB.

BPBD Provinsi NTB berkewajiban untuk membuat Renstra (rencana strategis) sebagai Dokumen Perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) merupakan lembaga daerah yang bertugas dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di daerah rawan bencana sehingga peran BPBD sangat penting dalam penanggulangan bencana alam Gempa Bumi di daerah khususnya di pulau Lombok, menurut data kebencanaan khususnya bencana Gempa Bumi sepanjang tahun 2018 setidaknya telah terjadi 203 kali gempa susulan yang terjadi di pulau Lombok yang berpusat di Lombok Utara dan Lombok Timur yang sangat berdampak terhadap masyarakat sekitar yang terkena bencana Gempa bumi dan kehilangan rumah, harta bahkan nyawa, menurut data BNPB mencatat sekurangnya 564 orang meninggal dunia, rumah rusak mencapai 164 unit, infrastruktur seperti jembatan, jalan, terminal Bu, dermaga, irigasi hingga bendungan, fasilitas kesehatan yang rusak mencapai 321, dan Rumah ibadah yang terkena dampak gempa bumi berjumlah 630 unit masjid, 461 mushola, 1 gereja, dan 1 vihara rusak akibat gempa bumi yang mengguncang pulau Lombok, sedangkan pada tahun 2019 hanya terjadi hanya terjadi 26 kali gempa di pulau Lombok yang tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat khususnya yang berada di pulau Lombok, tidak adanya alat peringatan Dini

bencana membuat masyarakat panik dan sulit menentukan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi sehingga banyak masyarakat yang kehilangan nyawa dan juga sulitnya akses lokasi bencana terjadi, sehingga lambatnya penanganan yang dilakukan oleh BPBD membuat tidak efektifnya peran BPBD sebagai badan atau lembaga yang menangani bencana yang terjadi di daerah.

Akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan harta, tempat tinggal bahkan nyawa, untuk itu perlu adanya upaya untuk menekan angka tersebut agar dapat memperkecil jumlah kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam yang bisa terjadi kapan saja dan mengintai kehidupan masyarakat khususnya di Pulau Lombok, Sehingga peran BPBD sangat penting dalam melakukan penanggulangan bencana Gempa Bumi di Lombok, menurut Soekanto (2009:212-213) peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya peran BPBD sebagai lembaga daerah yang bertugas dalam penanggulangan bencana sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana dapat di jalankan dengan baik dan dapat memenuhi perannya di dalam Masyarakat dan menjadi lembaga yang sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya yaitu penanggulangan bencana di daerah khususnya Lombok.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan BPBD dalam menanggulangi bencana Gempa bumi di Lombok?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana Gempa bumi di Lombok ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji bagaimana peran BPBD dalam menanggulangi bencana Gempa Bumi di Lombok.
2. untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana Gempa Bumi di Lombok.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana Gempa bumi di Lombok adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dan menambah pengetahuan terutama dalam bidang penanggulangan bencana Gempa Bumi oleh BPBD dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi penelitian di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Memperoleh wawasan dan pengalaman yang realistis sehingga suatu saat dapat diterapkan dalam dunia kerja sebagai bahan

perbandingan antara teori yang didapat pada masa perkuliahan dengan kenyataan yang didapat di lapangan.

b. Bagi kantor BPBD Kota Mataram

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagaimasukan guna meningkatkan efektifitas dari penerapan penanggulangan bencana Gempa Bumi oleh BPBD Kota Mataram.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Mataram

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik serta yang berkepentingan tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana Gempa Bumi di Lombok.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai dasar perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu tidak terlepas dari variabel penelitian ini.

Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama dan judul	Hasil penelian	Jenis penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Biyan Anugrah ¹ Awasu ¹ Herman Nayoan ² Jones Tompodung ³ (Tahun 2018) KINERJA BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MANADO DALAM UPAYA PENANGGULAN GAN KORBAN BENCANA BANJIR	<ul style="list-style-type: none">• Sampai dengan desember 2017 realisasi dari Nilai Akuntabilitas Kinerja badan penanggulangan bencana daerah yang dicapai adalah 70, sama dengan nilai target BPBD sebesar 70 maka diperoleh persentasi pencapaian kinerja 100% PD BPBD telah melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.• Realisasi dari ASN yang berkinerja baik PD BPBD sebesar 90% maka pencapaian	Deskriptip kualitatif	Persamaan terletak pada penanggulangan bencana di daerah, perbedaaan terletak pada lokasi, fokus penelitian dan badan atau lembaga yang menjadi tempat dilakukan penelitian.

Tabel 2.1 Lanjutan

		<p>kinerja 100% yang berarti tercapai target yang ditetapkan. Setiap ASN dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah menyelesaikan kerjanya dengan penilaian kinerja baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti mencapai 100% sama dengan persentasi target PD BPBD sebesar 100% maka diperoleh pencapaian kinerja 100%. Ada beberapa temuan BPK/Inspektorat yang menyebabkan TGR tetapi semuanya telah dipenuhi/dibayar ke kas daerah kota Manado oleh pihak yang tersangkut TGR 		
2	<p>Rosa Pevitanada, Dyah Hariani ANALISIS PENGORGANISASIAN PENANGGULANGAN BENCANA MALALUI KELURAHAN SIAGA BENCANA DI KELURAHAN JOMBANG, KECAMATAN CANDISARI, KOTA SEMARANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perincian pekerjaan di dalam KSB Jombang belum berjalan dengan baik. Terdapat perbedaan pemahaman tentang tujuan dari pembentukan KSB jombang. Selain itu permasalahan sumber daya yang ada di KSB Jombang juga terbatas. • Pembagaian pekerjaan di KSB Jombang yang telah dilaksanakan dengan baik. Penyusunan daftar pokok kegiatan di KSB Jombang yang disesuaikan dengan kegiatan dalam manajemen penanggulangan bencana. Selain itu pembagian tugas di KSB jombang juga dilaksanakan berdasarkan keahlian masing-masing anggota, serta sudah ada peran perempuan. • Departementalisasi di dalam KSB Jombang sudah dilakukan, tetapi terdapat 	Deskriptif kualitatif	<p>Persamaan terdapat pada penanggulangan bencana, perbedaan terletak pada ruang lingkup penelitian, lokasi dan fokus penelitian.</p>

Tabel 2.1 Lanjutan

		<p>ketidak jelasan dalam dasar departementalisasi yang digunakan. Selain itu, pola kerjasama yang dilakukan oleh KSB Jombang belum begitu terlihat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kornisasi pekerjaan di KSB Jombang dilakukan melalui koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Seluruh koordinasi internal KSB Jombang dilakukan melalui grup whatsapp. Sementara untuk koordinasi eksternal, melalui media komunikasi berupa REG, HT dan grup whatsapp. • Monitoring dan reorganisasi yang dilakukan di KSB Jombang belum berjalan dengan baik. Monitoring dilakukan oleh pihak kelurahan Jombang dan pihak BPBD kota semarang, Reorganisasi di KSB Jombang tidak berjalan, dikarenakan tidak ada partisipasi dari karang taruna. Sehingga itu juga diperlukan restrukturisasi di dalam KSB Jombang. 		
3	Aulia Rahman (2016) PERAN TARUNA SIAGA BENCANA DALAM MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN SERANG DAN SUKABUMI	<p>Kegiatan mitigasi yang dilakukan biasanya berbentuk penyuluhan, simulasi dan bakti sosial pada daerah-daerah yang rawan bencana serta daerah yang menjadi wilayah kampung siaga bencana (KSB), setiap kegiatan mitigasi yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat dan anggota taruna siaga bencana (Tagana). Peralatan komunikasi yang sudah diberikan kepada koordinasi tagana pada beberapa kecamatan di kabupaten serang</p>	kualitatif	<p>Persamaan terletak pada metode yang digunakan dan penanggulangan bencana. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, lokasi dan ruang lingkup penelitian.</p>

Tabel 2.1 Lanjutan

		mempermudah komunikasi dan pengerahan anggota tagana beserta unsur masyarakat lainnya. Tidak hanya Dinas Sosial kabupaten serang yang turut menginisiasi kegiatan mitigasi bencana, badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) kabupaten serang sebagai koordinator kegiatan penanggulangan bencana di kabupaten serang memiliki satu tugas pokok dan fungsi yakni mitigasi bencana sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana.	
--	--	---	--

Sumber: Data primer diolah, peneliti, 2020

2.1 Landasan teori

2.2.1 Administrasi Publik

Teori dalam Administrasi Publik adalah rangkaian ide mengenai bagaimana dua variabel atau lebih berhubungan. Terdapat beberapa kelompok teori dalam administrasi negara, antara lain:

1. Teori deskriptif eksplanatif, merupakan teori yang bersifat memberi penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara. Misalnya teori yang menjelaskan tentang ketidakmampuan administratif.
2. Teori normatif, yaitu teori yang bertujuan menjelaskan situasi masa mendatang, idealnya dari suatu kondisi. Misalnya teori tentang kepemimpinan ideal masa depan.
3. Teori Asumtif, yaitu teori-teori yang menekankan pada prakondisi, anggapan adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau

proposisi. Misalnya Teori X dan Y dari McGregor yang menyatakan manusia mempunyai kemampuan baik (Y) dan kurang baik (X)

4. Teori Instrumental, yaitu teori-teori yang memfokuskan pada “bagaimana dan kapan”, lebih pada penerapan atau aplikasi dari teori. Misalnya teori tentang kebijakan, bagaimana kebijakan dijalankan dan kapan waktunya.

Ada beberapa isu atau permasalahan penting yang sering dibahas dalam ilmu administrasi negara antara lain :

1) Pelayanan publik

Administrasi publik sebagai proses administrasi for publik, pada hakekatnya adalah memberi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan demokrasi yang mana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menerima pelayanan dari pemerintah. Dalam masalah ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah/negara memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat.

2) Motivasi Pelayanan Publik

Dalam masalah ini isu terpenting adalah membahas motivasi seperti apa yang dimiliki oleh administrator dalam memberikan pelayanan publik. Ada yang berdasarkan norma, rasional dan perasaan.

3) Maladministrasi

Maladministrasi merupakan kesalahan dalam praktek administrasi. Pembahasan teori administrasi publik juga akan membahas masalah

kesalahan-kesalahan tersebut sebagai kajian utama, seperti lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan.

4) Etika Administrasi Publik

Masalah penting lainnya dalam administrasi publik adalah etika administrasi. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah nilai baik dan buruk. Apakah pelayanan atau prosedur administrasi publik dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk korupsi menjadi bahasan utama.

5) Kinerja dan Efektivitas

Seringkali masalah kinerja dan efektivitas menjadi isu sentral dari administrasi publik. Hal tersebut dipahami karena administrasi sebagai proses mencapai tujuan, maka persoalan pencapaian dan cara mencapai tersebut menjadi penting. Oleh karena itu bagaimana cara kerja (kinerja) yang dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).

6) Akuntabilitas Publik

Administrasi publik yang dijalankan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga. Ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikontrol, diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada warga/publik. Hal tersebut merupakan masalah pokoknya.

2.3 Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.3.1 Pengertian Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peranan adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Identitas Peran, Terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, dan yang menimbulkan identitas peran (role identify). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.

1. Persepsi Peran

Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (role perception). Berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana

seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran (role expectation) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana anda bertindak.

3. Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (role conflict). Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

2.3.2 Teori Peran Menurut Para Ahli

1. Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
2. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

3. Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143).

2.3.3 Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli

1. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).
2. Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:
 - a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

- a. Keterlibatan dalam keputusan mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- c. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
- d. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
- e. Peran masyarakat sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. Peran Informal (Peran tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Pada akhir tahun 1960-an, Henry Mintzberg, seorang lulusan MIT, melakukan penelitian seksama terhadap lima orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka. Berdasarkan observasinya, Mintzberg

menyimpulkan bahwa manajer melakukan sepuluh peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling berkaitan erat. Seperti yang diperlihatkan dalam table di bawah ini, kesepuluh peran ini bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

a. Peran Antarpersonal

Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

b. Peran Informasional

Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan semacamnya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

c. Peran Pengambilan Keputusan

Akhirnya, Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesaian masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri.

Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

Makna peran menurut suhardono, yaitu pertama penjelasan historis. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

2.3.4. Dasar Hukum Penanggulangan Bencana

Undang- Undang N0. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana:

Pasal 35 penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan resiko bencana;
- c. Pencegahan
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis resiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan, dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

pasal 36

- (1) perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh badan.
- (3) perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana,
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

- (5) pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana:

- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta berhak atas rasa aman dari ancaman dari suatu kejadian bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia;
- b. bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi, dan menyeluruh baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan penjabaran lebih lanjut dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang penanggulangan bencana.

2.4 Penanggulangan Bencana

2.4.1 Pra Bencana

Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

1. Kesiagaan

Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.

2. Peringatan Dini

Langkah lainnya yang perlu dipersiapkan sebelum bencana terjadi adalah peringatan dini. Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau badai.

Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang berpotensi terkena bencana akan kemungkinan

datangnya suatu bencana di daerahnya masing-masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana. Sebagai contoh, jauh sebelum badai Katrina tiba, badan yang berwenang sudah dapat melakukan ramalan dan memperkirakan kapan terjadinya badai, lokasi, serta kekuatannya. Dengan demikian anggota masyarakat dapat diberi informasi sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik.

Sistem peringatan dini sudah berkembang pesat didukung oleh berbagai temuan teknologi. Di Indonesia berbagai ramalan atau perkiraan akan datangnya bencana sudah banyak dilakukan seperti cuaca, gempa, tsunami, dan banjir. Pemerintah telah memasang berbagai peralatan peringatan dini di berbagai kawasan di Indonesia.

3. Mitigasi Bencana

Menurut peraturan pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian.

Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Teknis

secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya:

1. Membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa.
2. Membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material tahan api.
3. Membuat rancangan teknis pengaman, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.

b. Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu diperilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

c. Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya ditahap mitigasi sebagai contoh:

1. Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana.
2. Sistem perijinan dengan memasukan aspek analisa risiko bencana.
3. Menerapkan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri berisiko tinggi.
4. Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan.

5. Menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat di setiap organisasi baik pemerintahan maupun industri berisiko tinggi.

d. Pendekatan Kultural

Masih ada anggapan dikalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berfikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana dan sekaligus mengurangi keparahannya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kultural untuk meningkatkan kesadaran mengenai bencana. Melalui pendekatan kultural, pencegahan bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal yang telah membudaya sejak lama.

Upaya pengendalian dan pencegahan bencana disesuaikan dengan budaya lokal dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai contoh, bagaimana keberhasilan Wali Songo mengembangkan agama Islam melalui pendekatan budaya melalui wayang atau tradisi lainnya. Sebaiknya pemerintah daerah setempat mengembangkan budaya dan tradisi lokal tersebut untuk membangun kesadaran akan bencana di tengah masyarakat.

2.4.2 Saat Kejadian Bencana

Tahapan paling krusial dalam sistem manajemen bencana adalah saat bencana sesungguhnya terjadi. Mungkin telah melalui proses peringatan dini, maupun tanpa peringatan atau terjadi secara tiba-tiba. Bencana banjir,

mungkin dapat diperkirakan sebelumnya berdasarkan angka curah hujan yang terjadi. Bencana angin topan juga dapat diprediksi sebelumnya sehingga saat kejadian masyarakat sudah mempersiapkan dirinya masing-masing. Namun banyak bencana, khususnya gempa bumi yang masih sulit diperkirakan terjadinya.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan.

1. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana (*response*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Tanggap darurat adalah tindakan segera yang dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana misalnya dalam suatu proses kebakaran atau peledakan di lingkungan industri:

- a. Memadamkan kebakaran atau ledakan.
- b. Menyelamatkan manusia dan korban (*rescue*).
- c. Menyelamatkan harta benda dan dokumen penting (*salvage*).
- d. Perlindungan masyarakat umum.

Tindakan ini dilakukan oleh tim penanggulangan bencana yang dibentuk dimasing-masing daerah atau organisasi.

Menurut PP No. 11, langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, sehingga dapat diketahui dan diperkirakan magnitude bencana, luas area yang terkena dan perkiraan tingkat kerusakannya.
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana.
- c. Berdasarkan penilaian awal dapat diperkirakan tingkat bencana sehingga dapat pula ditentukan status keadaan darurat. Jika tingkat bencana sangat besar dan berdampak luas, mungkin bencana tersebut dapat digolongkan sebagai bencana nasional.
- d. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;Langkah berikutnya adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kemungkinan besar bencana tersebut menimbulkan korban yang dapat segera ditemukan, namun tidak jarang pula korban terjebak atau tertimbun reruntuhan sehingga diperlukan upaya keras untuk dapat menyelamatkannya.

1. Pemenuhan kebutuhan dasar;

Dalam kondisi bencana, kemungkinan besar semua sarana umum, sanitasi dan logistik mengalami kehancuran atau sekurangnya terputus. Untuk itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memberikan layanan kebutuhan dasar seperti pangan dan papan.

2. Perlindungan terhadap kelompok rentan

salah satu prioritas dalam penyelamatan korban bencana adalah kelompok yang dikategorikan rentan, misalnya anak-anak, orang tua, cacat, pasien di rumah sakit, dan kaum lemah lainnya. Mereka perlu dibantu terlebih dahulu dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman sehingga tidak menambah jumlah korban bencana.

3. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Tim tanggap darurat juga bertugas untuk segera memulihkan kondisi prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti saluran air minum, listrik, dan telepon. Sarana vital ini sangat menentukan dalam mendukung upaya pemulihan dan peyelamatan korban bencana.

2. Penanggulangan Bencana

Selama kegiatan tanggap darurat, Upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian.

Sebagai contoh, kasus lumpur Lapindo memerlukan upaya penanggulangan yang tidak mudah untuk dapat menghentikan semburan lumpur. Kebakaran atau tumpahan minyak dalam jumlah besar di laut lepas juga memerlukan upaya penanggulangan yang sangat berat dengan mengerahkan seluruh tim tanggap darurat, bahkan mungkin memerlukan sumberdaya tambahan.

Tim tanggap darurat diharapkan mampu menangani segala bentuk bencana. Oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang untuk dapat menangani berbagai jenis bencana.

2.4.3 Pasca Bencana

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Di tingkat industri atau perusahaan, fase rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan jalannya operasi perusahaan seperti sebelum bencana terjadi. Upaya rehabilitasi misalnya memperbaiki peralatan yang rusak dan memulihkan jalannya perusahaan seperti semula.

2. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana dan peran serta semua anggota masyarakat. Sebagai contoh, rekonstruksi Aceh pasca tsunami memerlukan waktu tidak kurang dari 5 tahun agar kondisi fisik dan mental, lingkungan dan teknis, serta prasarana ekonomi dibangun kembali dan diharapkan akan lebih baik dibandingkan kondisi sebelum bencana.

2.5. Pengertian Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana ada bermacam-macam menurut sumber atau penyebabnya. United national for development (UNDP) mengelompokkan bencana atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

1. Bencana alam (natural disaster) antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
2. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan.
3. Bencana sosial antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi termasuk bencana akibat peperangan.

Menurut undang-undang No. 24 tahun 2007, bencana diklasifikasi atas 3 jenis sebagai berikut:

1. Bencana alam yaitu bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, meteor, pemanasan global, banjir, topan, tsunami.
2. Bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagalnya teknologi, gagalnya medernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial anantara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

2.5.1 Bencana Alam

Bencana alam terjadi hampir sepanjang tahun diberbagai belahan dunia, termasuk indonesia. Jenis bencana alam sangat banyak beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Gempa

Gempa merupakan kejadian alam yang paling sering dan banyak menimbulkan korban. Menurut kejadiannya, gempa merupakan gejala alam, berupa sentakan alamiah yang terjadi di bumi, yang sumbernya di dalam bumi dan merambat ke permukaan.

2. Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang (tsu= pelabuhan, nami= gelombang) yang dapat diartikan sebagai gelombang pasang. Umumnya, tsunami menerjang pantai landai. Tsunami diperkirakan terjadi karena

adanya perpindahan badan air yang disebabkan perubahan muka laut secara vertikal dengan tiba-tiba yang disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain karena gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung api bawah laut, longsor bawah laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500-1000 km per jam. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam, namun ketinggiannya sudah meningkat hingga mencapai puluhan meter. Hantaman gelombang tsunami bisa masuk hingga puluhan kilometer dari bibir pantai.

3. Letusan Gunung Api

Indonesia adalah daerah bergunung api sehingga bencana letusan gunung api sering terjadi antara lain Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Galunggung, Gunung Semeru dan lainnya. Gunung api tersebar hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan posisi Indonesia yang berada dalam jalur "ring of fire". Letusan terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000°C. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700-1.200°C. Letusan gunung api yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh

radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km.

4. Banjir

Meningkatnya banjir yang melanda beberapa daerah di wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sering dikaitkan dengan pembabatan hutan di kawasan hulu dari sistem daerah aliran sungai (DAS). Banjir, merupakan bencana alam yang paling dapat diramalkan kedatangannya, karena berhubungan besar curah hujan. Disebabkan karena pembabatan hutan yang tidak terkendali, sistem pengaturan atau tata air yang buruk, perubahan fungsi hutan menjadi ladang dan pemukiman.

Kegiatan penebangan hutan dan pemadatan tanah mengakibatkan air hujan sulit terserap ke tanah. Sebagian besar menjadi air permukaan disertai lumpur. Ditambah lagi kondisi sungai yang sudah mengalami erosi, dangkal dan menyempit, bantaran sungai yang penuh dengan penghuni, serta penyumbatan saluran air.

Banjir umumnya terjadi di dataran rendah di bagian hilir daerah aliran sungai. Umumnya berupa delta maupun alluvial. Secara geologis, berupa lembah atau bentuk cekungan bumi lainnya dengan porositas rendah. Daerah daratan rendah dan rata tersebut umumnya menjadi tujuan utama pusat pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti pesisir utama pulau Jawa seperti daerah aliran Bengawan Solo, dataran Sungai Citarum, dan Sungai Brantas. Di pulau Sumatera potensi

banjir banyak terjadi di daerah sebelah timur seperti Sumatera Utara, Riau, dan Jambi.

5. Longsor

Longsor merupakan gejala alam untuk mencapai kondisi kestabilan kawasan. Seperti halnya banjir, sebenarnya gerakan tanah merupakan bencana alam yang dapat diramalkan kedatangannya, karena berhubungan dengan besarnya curah hujan.

2.5.2. Bencana Buatan Manusia (Man Made Disaster)

Bencana buatan manusia (man made disaster) atau sering juga disebut bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan atau terjadi karena campur tangan manusia. Campur tangan ini dapat berupa langsung atau tidak langsung. Buatan manusia langsung misalnya bencana akibat kegagalan teknologi di suatu pabrik atau industri. Bencana tidak langsung misalnya pembabatan hutan yang mengakibatkan timbulnya bahaya banjir.

Berbagai bentuk bencana yang terkait dengan kegiatan manusia antara lain:

a. Bencana industri

adalah bencana yang berkaitan dengan aktivitas industri dalam proses operasinya. Kegiatan industri mengandung berbagai bahaya yang berpotensi menimbulkan bencana khususnya industri beresiko tinggi.

Bencana yang dapat terjadi akibat kegiatan industri antara lain:

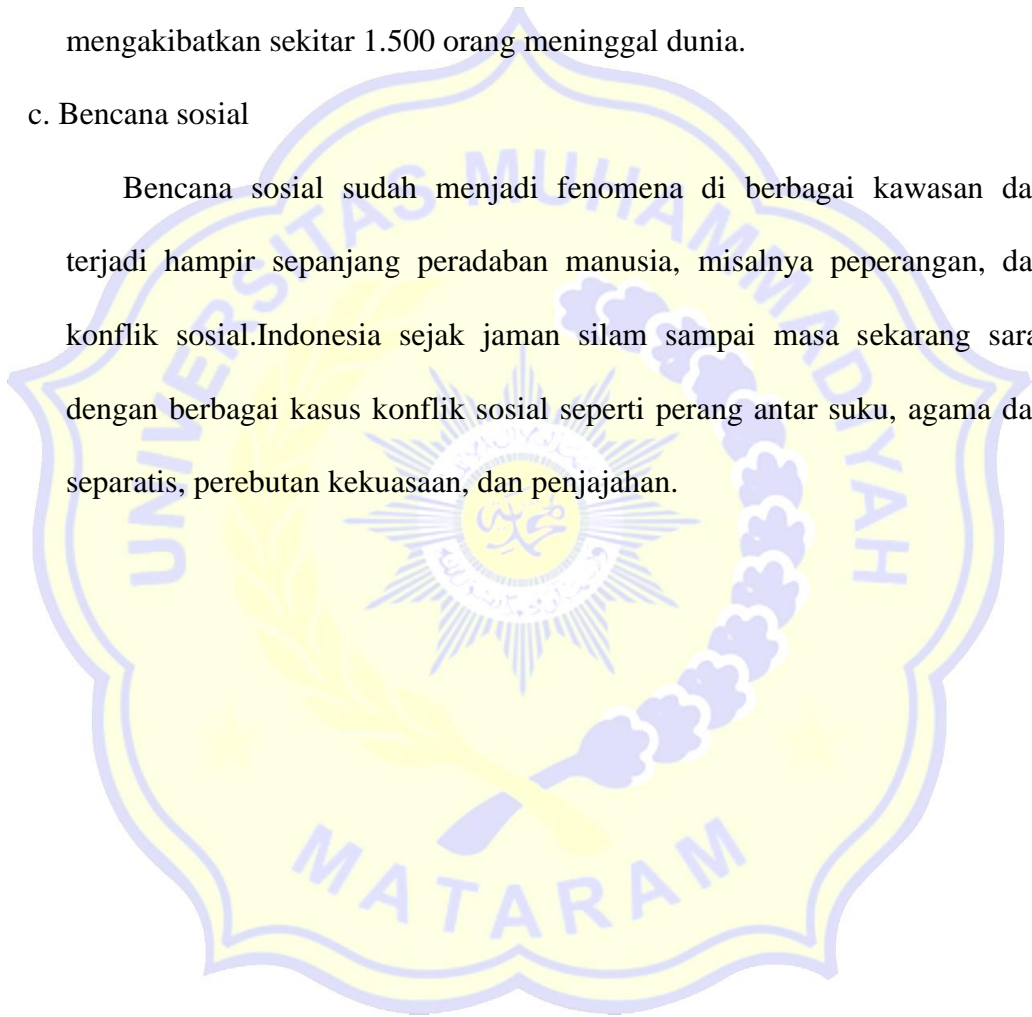
1. Kebakaran dan peledakan
2. Bocoran bahan berbahaya dan beracun
3. pencemaran lingkungan
4. kegagalan konstruksi

b. Bencana Non Industri

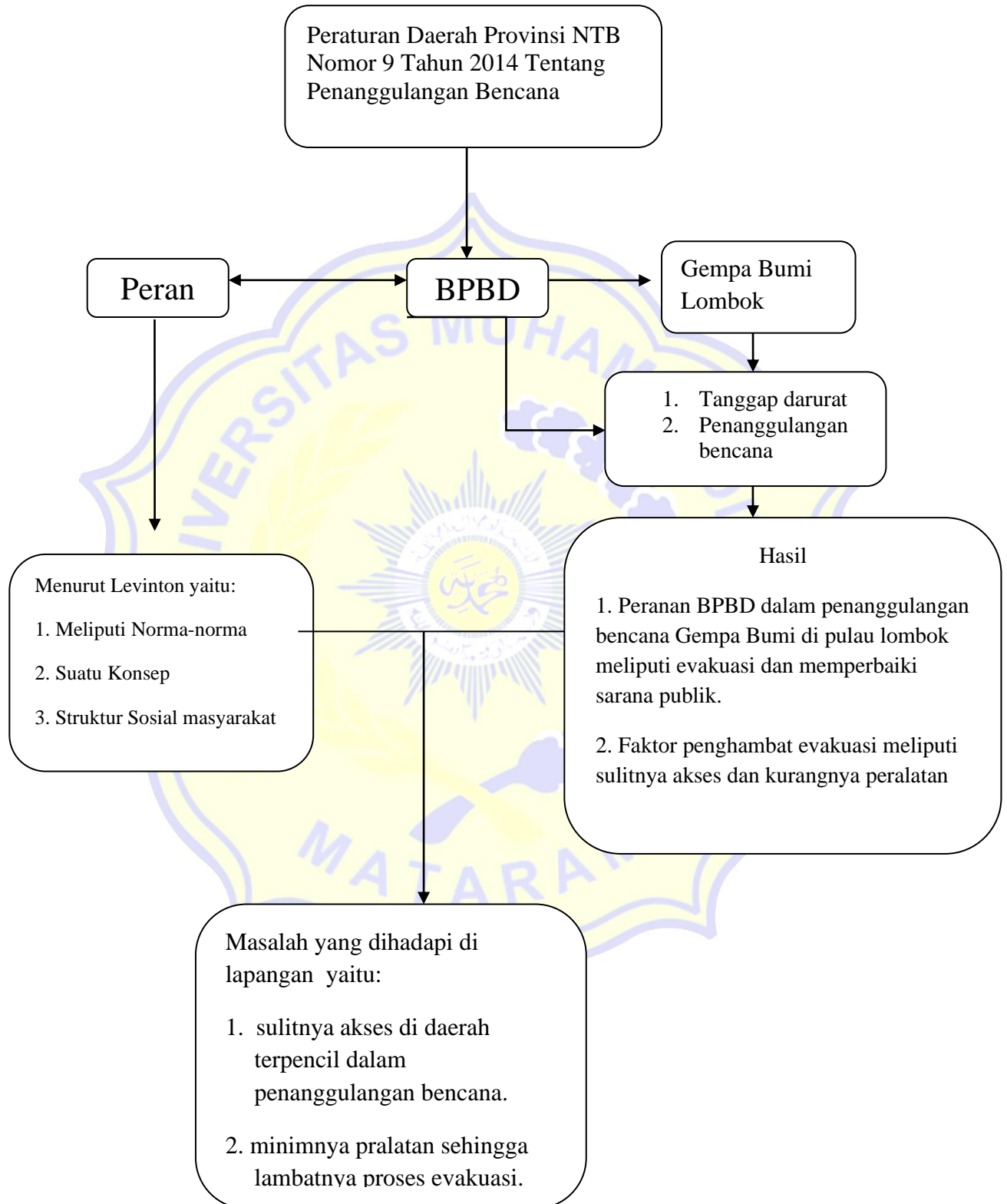
Bencana non industri juga banyak terjadi di berbagai negara dan kawasan di dunia, mulai dari bencana transportasi, publik, pemukiman, dan lainnya. Salah satu bencana transportasi yang menjadi sejarah manusia adalah tenggelamnya kapal Titanictanggal 14 april 1912 yang mengakibatkan sekitar 1.500 orang meninggal dunia.

c. Bencana sosial

Bencana sosial sudah menjadi fenomena di berbagai kawasan dan terjadi hampir sepanjang peradaban manusia, misalnya peperangan, dan konflik sosial.Indonesia sejak jaman silam sampai masa sekarang sarat dengan berbagai kasus konflik sosial seperti perang antar suku, agama dan separatis, perebutan kekuasaan, dan penjajahan.



2.5. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan deskriptif pendekatan kualitatif. Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, penelitian bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan Peran BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Lombok.

3.2. Waktu dan lokasi penelitian

3.2.1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 1 minggu setelah sidang proposal yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu 6 Februari 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020.

3.2.2 Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi tempat atau lokasi penelitian ini yaitu Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di jalan. Linkar selatan, Jempong Baru Kec. Sekarbela, kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena BPBD Provinsi NTB yang memiliki peran utama dalam pengumpulan data dan narasumber. Selain itu, peneliti sudah mengetahui seluk beluk dari BPBD provinsi NTB sehingga memberikan kemudahan untuk memperoleh data terkait dengan penelitian.

3.3. Informan atau narasumber

Narasumber merupakan informasi kunci atau orang-orang yang berpotensi memberikan informasi yang diperlukan. Informasi ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Narasumber yang di pilih untuk mendapatkan informasi tersebut yaitu:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
3. Staf-staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam moleong (2011: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membagi data dalam penelitian ini ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi padakantor BPBD Provinsi NTB.
2. Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data-data yang dapat dijadikan informasi yakni berupaperaturan daerah, artikel dan data-data lainnya yang berkaitan dengan peran BPBD Provinsi NTB dalam penanggulangan bencana alam di NTB.

3.5 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer dan sekunder untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu suatu langkah yang sangat penting karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian. Adapun beberapa tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Oleh karena observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan kontrol reliabilitasnya dan validitasnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 2010: 82).

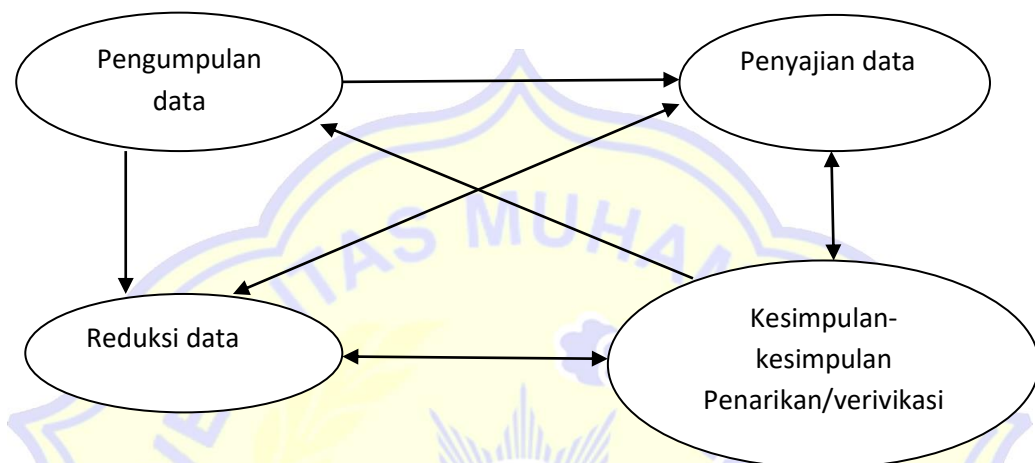
3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh dan dianggap kredibel (Sugiyono 2010: 91)

Gambar 1.

Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14)

Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009: 339), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk

data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi dan menggerogoti kecendrungan-kecendrungan mereka untuk menemukan pola-pola sederhana.

3. Menarik kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang

diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Menurut Sugiyono (2012: 373) terdapat tiga macam trigulasi menentukan keabsahan data yakni:

1. Trigulasi Sumber

Trigulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Trigulasi Teknik

Trigulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Trigulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Maka dari itu dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi berbeda. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan trigulasi sumber. Dengan menggunakan trigulasi sumber peneliti melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan Dinas Sosial Provinsi NTB.

Selain itu, untuk menentukan keabsahan data pada penelitian yaitu menggunakan kecukupan referensial. Kecukupan referensi yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk menganalisis data.